

MOTIVASI ELITE POLITIK DAN ELITE AGAMA DALAM GERAKAN SOSIAL (Studi Historis Bengkulu Abad XIX)

Agus Setiyanto

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bengkulu
Jl. Wr. Supratman, Kandang Limun Bengkulu
agussetiyanto@yahoo.com

Abstract: *Political Elite Motivation and Religion Elite in The Social Movement (Historical Studies Bengkulu XIX century).* Motivation of traditional political elite and religious elite are involved in social movements in Bengkulu in the XIX century is closely related to the problem of injustice, tyranny, oppression, and badness committed by the colonial government both Britain and the Netherlands. Motivation involvement of the traditional political elite and the religious elite in social movements are not single, but caused by several factors, such as economic factors, and political. Then motivation traditional political elite and the religious elite in Bukit Palik events (1807), Tabath Mono events (1835), Seluma events (1835), Tanjung Terdana events (1873), as well as Bintunan events (1873).

Keywords: Motivation, traditional political elite, religious elite, social movements.

Abstrak: *Motivasi Elite Politik dan Elite Agama dalam Gerakan Sosial (Studi Historis Bengkulu Abad XIX).* Motivasi elit politik tradisional dan elit agama terlibat dalam gerakan sosial di Bengkulu pada abad XIX berkaitan erat dengan masalah ketidakadilan, kesewenangan, ketertindasan, maupun kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah kolonial baik Inggris maupun Belanda. Motivasi keterlibatan elit politik tradisional dan elit agama dalam gerakan sosial tidaklah tunggal, melainkan dilatar-belakangi oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi, maupun politik. Demikian juga motivasi elit politik tradisional dan elit agama dalam peristiwa Bukit Palik (1807), peristiwa Tabat Mono (1835), peristiwa Seluma (1835), peristiwa Tanjung Terdana (1873), maupun peristiwa Bintunan (1873).

Kata kunci: Motivasi, elite politik tradisional, elite agama, gerakan sosial.

Pendahuluan

Motivasi bertalian dengan tiga hal yang sekaligus merupakan aspek-aspek dari pada motivasi. Ketiga hal tersebut adalah keadaan yang mendorong tingkah laku (*Motiving states*), yaitu tingkah laku yang didorong oleh keadaan tersebut (*Motiving Behavior*), dan tujuan dari tingkah laku tersebut (*Goal or Endsof Such Behavior*). Chifford T. Morgan, Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu: (1) kebutuhan fisiologikal (*physiological needs*), seperti : rasa lapar, haus, istirahat dan sex; (2)

kebutuhan rasa aman (*safety needs*), tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual; (3) kebutuhan akan kasih sayang (*love needs*); (4) kebutuhan akan harga diri (*esteem needs*), yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status; dan (5) aktualisasi diri (*self actualization*), dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Kebutuhan-kebutuhan yang disebut pertama (fisiologis) dan kedua (keamanan) kadang-kadang diklasifikasikan dengan cara lain, misalnya dengan menggolongkannya

sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya dikenal pula dengan klasifikasi kebutuhan sekunder. Terlepas dari cara membuat klasifikasi kebutuhan manusia itu, yang jelas adalah bahwa sifat, jenis dan intensitas kebutuhan manusia berbeda satu orang dengan yang lainnya karena manusia merupakan individu yang unik. Juga jelas bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya bersifat materi, akan tetapi bersifat psikologikal, mental, intelektual dan bahkan juga spiritual.

Pembahasan

A. Motivasi Elite Politik Tradisional dan Elite Agama Dalam Gerakan Sosial

1. Motivasi Elite Politik Tradisional dan Elit Agama dalam Peristiwa Bukit Palik (1807).

Faktor ekonomi yang melatar-belakangi motivasi elit politik tradisional maupun elit agama melakukan gerakan perlawanan dalam peristiwa Bukit Palik (1807) adalah karena kebijakan pemerintah kolonial Inggris yaitu, Residen Thomas Parr yang memaksakan penduduk Bengkulu untuk kembali menanam kopi. Padahal penduduk sudah lama meninggalkan tanaman kopi, dan beralih pada penanaman merica yang lebih menguntungkan. Sebagai kelompok terpendang dan berpengaruh dalam masyarakatnya, elit politik tradisional ini lebih termotivasi dengan cara memobilisasi rakyatnya untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Inggris.

Faktor politik yang berbau ekonomi yang melatar-belakangi keterlibatan elit politik tradisional dalam gerakan sosial, yaitu penghapusan hak-hak tradisional para kepala pribumi dengan

dalih penertiban administrasi pemerintah Inggris. Konsekuensi logisnya adalah terancamnya hak-hak tradisional para kepala pribumi seperti, hak *pre-empti*, terutama kaum elit politik tradisional. Kaum elit politik tradisional secara turun-temurun mempunyai hak klaim sebagai pendahulu secara turun-temurun, seperti hak mengklaim (memiliki) binatang kerbau liar dalam hutan wilayahnya, hak mengklaim hasil bumi dalam perniagaan yang diangkut melalui sungai, dan sebagian dari hasil perniagaan lainnya, serta biaya-biaya dalam suatu sidang perkara adat.¹ Intervensi politik pemerintah kolonial Inggris terhadap kehidupan tradisional elit politik tradisional yang berimbas terhapusnya klaim-klaim tradisional telah memotivasi keterlibatannya dalam gerakan sosial.

Faktor politik yang berbau budaya dan ekonomi yang melatar-belakangi keterlibatan elit politik tradisional dalam peristiwa Bukit Palik (1807), yaitu kebijakan politik kolonial Inggris tentang penghapusan gelar kepangeranan. Pemerintah kolonial Inggris menganggap, bahwa gelar yang disandang oleh para elit politik tradisional itu tidak diperlukan lagi, kecuali gelar *pangeran* atau *kalipa*. Pemerintah kolonial Inggris ingin menghapus kebiasaan masyarakat pribumi tentang pemberian gelar kepangeranan kepada para elit politik tradisional. Kebijakan tersebut, ujungnya memang berkaitan dengan ekonomi, karena ada insentif perbulan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Inggris bagi para elit politik yang memiliki gelar tersebut. Kebijakan inilah yang menjadi motivasi keterlibatan elit politik tradisional dalam gerakan sosial, terutama

mereka yang terkena penghapusan gelarnya karena kehilangan insentifnya. Kaum elit politik tradisional ingin tetap mempertahankan status quonya, dan mereka akan melawan ketika merasa terganggu kehidupan tradisionalnya. Sementara itu, kaum elit agama yang tidak terkena imbasnya secara langsung termotivasi melalui jalinan persekutuan dan solidaritas sosial yang kuat dengan kaum elit politik tradisional.

2. Motivasi keterlibatan elit politik tradisional dan elit agama dalam peristiwa Tabat Mono (1835)

Peristiwa ini juga tidak terlepas dari faktor ekonomi, dan politik. Faktor politik yang berimbas ekonomi yang melatarbelakangi motivasi elit politik tradisional dan elit agama dipicu oleh kebijakan Asisten Residen John Hendrik Knoerle (1831-1833) yang mengaktifkan kembali para *ambtenar* (pegawai) Eropa untuk menjaga pos-pos di wilayah pegunungan. Dengan hadirnya kembali kekuasaan para *ambtenar* Eropa di wilayah tersebut, maka secara politis telah membatasi dan mempersempit wilayah kekuasaan para elit politik tradisional setempat. Hukum tradisional akan diganti dengan hukum kolonial, dan kaum elit politik tradisional tidak bisa leluasa mengatur kehidupan tradisional sehingga berimbas pada ekonomi, yaitu menurunnya pendapatan mereka. Motivasi elit politik tradisional semakin diperkuat oleh kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda yang merombak sistem peradilan tradisional yang sudah mengakar serta penghapusan gelar kepangeranan secara turun-temurun. Dengan dihapuskannya gelar kepangeranan tersebut, maka mereka tidak mendapatkan lagi insentif

perbulannya dari pemerintah Belanda. demikian juga dengan dirombaknya sistem peradilan tradisional menjadi sistem peradilan kolonial, maka mereka akan kehilangan pendapatan yang biasa diperoleh melalui biaya-biaya perkara dalam persidangan. Kedua kebijakan politik yang berimplikasi ekonomi inilah yang memperkuat motivasi keterlibatannya dalam peristiwa Tabat Mono (1835), terutama kaum elit politik tradisional yang terkena imbasnya secara langsung. Selanjutnya elit agama yang tidak terkena secara langsung dampaknya, termotivasi untuk ikut terlibat dalam peristiwa Tabat Mono (1835) setelah bersekutu dengan elit politik tradisional.

3. Motivasi keterlibatan elit politik tradisional dan elit agama dalam peristiwa Seluma (1835)

Sebelum ada invensi dari pemerintah kolonial Belanda, kehidupan masyarakat di wilayah Afdeling Seluma berjalan sesuai dengan tradisi, dan adat kebiasaan yang berlaku secara turun temurun. Para kepala pribuminya juga memiliki hak *pre-empti* (hak klaim sebagai pendahulu secara turun-temurun), berupa klaim atas kerbau liar dalam hutan wilayahnya, hak mendapatkan prosestase hasil bumi dalam perniagaan yang diangkut melalui sungai, dan prosestase dalam sidang perkara adat setempat. Namun setelah pemerintah kolonial Belanda mengaktifkan kembali para pegawai Eropa untuk menjalankan fungsi administrasi pemerintahannya di wilayah Afdeling Seluma, kehidupan masyarakat tradisional mulai terancam, terutama kaum elit politik tradisional. Pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan berbagai macam peraturan yang banyak

merugikan kehidupan kaum elit politik tradisional. Pemerintah kolonial Belanda juga menghapuskan gelar kepangeranan, menghapuskan pajak-pajak tradisional, serta merombak sistem peradilan pribumi yang dianggap tidak sesuai dengan hukum kolonial. Salah satu alasan pemerintah kolonial Belanda merombak sistem peradilan pribumi karena para kepala pribuminya terkesan memberikan peluang terhadap tindak kejahatan, bahkan sengaja memanfaatkannya sebagai tambahan pendapatan melalui denda-denda dalam perkara adat (*Sumatera Factory Record*, 103). Dengan dirombaknya sistem peradilan pribumi menjadi sistem peradilan yang berdasarkan hukum kolonial maka hilanglah peluang bagi elit politik tradisional untuk mendapatkan tambahan pendapatan para kepala pribuminya. Faktor politik yang berimbas ekonomi inilah yang mendasari motivasi kaum elit politik tradisional melakukan gerakan sosial. Sementara itu, elit agama termotivasi untuk ikut terlibat dalam gerakan sosial setelah bersekutu dengan elit politik tradisional setempat. Faktor lain yang memperkuat motivasi elit politik tradisional terlibat dalam gerakan sosial adalah pelarangan dan sanksi hukum tentang bepergian dengan membawa senjata tajam. Pemerintah kolonial Belanda melalui, *gezaghebber* (kepala pos wilayah Seluma) Van den Bosch, melarang bagi siapa saja yang bepergian dengan membawa senjata tajam. Larangan yang disertai dengan sanksi hukum tersebut, jelas bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat pribumi, terutama laki-laki dewasa yang selalu membawa senjata setiap bepergian. Bagi elit politik tradisional, membawa senjata tajam itu

selain menjadi kebiasaan juga menjadi kebanggaan dan sekaligus simbol prestise sosial. Oleh karena itu, pelarangan membawa senjata tajam tersebut dianggap menurunkan gengsi sosial bagi seseorang, terlebih gengsi sosial seorang kepala pribumi. Faktor-faktor tersebut di atas menjadi penyebab motivasi elit politik tradisional terlibat dalam peristiwa Seluma (1835).

4. Motivasi keterlibatan elit politik tradisional dan elit agama dalam peristiwa Tanjung Terdana (1873)

Kebijakan politik pemerintah kolonial merombak sistem peradilan tradisional yang sudah mengakar dan menggantinya dengan sistem peradilan menurut hukum kolonial Belanda telah berdampak pada kehidupan kaum tradisional para kepala pribumi setempat. Selain mempersempit kekuasaan tradisionalnya, juga berdampak pada penurunan pendapatannya. Secara politik para kepala pribumi tersebut telah kehilangan kekuasaan tradisionalnya. Dengan dirombaknya sistem peradilan pribumi menjadi sistem peradilan kolonial, maka kaum elite politik tradisional tidak bisa lagi menjadi hakim, maupun penuntut dalam dewan peradilan pribumi. Sebaliknya, mereka bisa terkena jerat hukum kolonial jika melakukan pelanggaran-pelanggaran menurut tata hukum kolonial. Sejak diterapkannya hukum kolonial Belanda, sudah banyak para kepala pribumi yang terjerat hukum kolonial baik berupa hukuman ringan hingga hukuman buang². Di samping itu, mereka juga kehilangan tambahan pendapat karena tidak bisa lagi mendapatkan denda-denda adat dalam sidang perkara di peradilan pribumi.

Kedua faktor ini menjadi bagian terpenting sebagai penyumbang motivasi keterlibatan elit politik tradisional dalam gerakan sosial. Faktor lain yang juga tak kalah pentingnya adalah penghapusan gelar kepangeran. Dengan dihapuskannya gelar *pangeran* tersebut, maka secara otomatis hilanglah tunjangan insentif bulanan dari pemerintah Belanda, dan turun pula prestise sosialnya. Salah satu elit politik tradisional dari Suku Lembak yang terkena dampaknya adalah Pangeran Burniat, seorang kepala pribumi dari Tanjung Terdana yang masih kerabat dekatnya Pangeran Sungai Itam. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam penerapan *hoofd van belastingen*" (pajak kepala), serta pemberlakuan Undang Undang Simbur Cahaya sebagai pengganti Undang Undang Perpati Nan Sebatang juga memperkuat motivasi dalam gerakan sosial. Faktor-faktor tersebut menjadi vitamin penguat motivasi bagi elit politik tradisional terlibat dalam peristiwa Tanjung Terdana (1873). Keterlibatan Haji Merdayan (elit agama) dalam peristiwa Tanjung Terdana juga tidak lepas dari terjalannya persekutuan serta solidaritas yang kuat dengan Pangeran Burniat sebagai kepala pribumi (elit politik tradisional) Tanjung Terdana.

5. Motivasi keterlibatan elit politik tradisional dan elit agama dalam peristiwa Bintunan (1873)

Motivasi keterlibatan gerakan sosial para kepala pribumi dan para pemimpin agama di wilayah Afdeling Lais, terutama di Bintunan dipicu oleh pemberlakuan sistem *hoofd van belastingen* (pajak kepala) dan penerapan Undang-Undang Simbur Cahaya. Pajak kepala ini mulai

diberlakukan di seluruh wilayah Bengkulu pada awal tahun 1873 oleh Asisten Residen H.C. Humme (1872-1873), yang selanjutnya diteruskan oleh penggantinya, yaitu Asisten Residen H. van Amstel (1873-1873).³ Sementara itu, rakyat masih harus menanggung beban ekonomi yang cukup berat berupa "*cultuurstelsel*" (sistem tanam paksa) yaitu tanam paksa kopi dan lada.⁴

Undang Undang Simbur Cahaya ciptaan Asisten Residen J. Walland yang diadopsi dari Palembang itu tidak sesuai dengan tata kehidupan tradisional masyarakat adat di wilayah Bengkulu. Oleh karena itu menimbulkan kecemasan, terutama para kepala pribuminya.

Perombakan sistem peradilan pribumi dengan sistem peradilan kolonial, juga menjadi penguat motivasi keterlibatan para kepala pribumi di wilayah Afdeling Lais dalam peristiwa Bintunan (1873). Peradilan kolonial ini sangat berdampak bagi kehidupan tradisional para kepala pribumi setempat. Mereka tidak hanya kehilangan kekuasaan tradisionalnya, tetapi juga kehilangan mata pencaharian tambahan.

Dengan diberlakukannya sistem peradilan kolonial, maka sistem peradilan pribumi sudah tidak berlaku lagi. Dengan tidak berlakunya sistem peradilan pribumi, maka para kepala pribumi tidak bisa lagi menjadi hakim maupun penuntut dalam sidang perkara. Dengan demikian, mereka juga kehilangan pendapatan yang biasa diperoleh melalui denda-denda dalam sidang perkara adat. Pemberlakuan sistem peradilan menurut tata hukum kolonial Belanda telah berdampak bagi kehidupan tradisional para kepala pribumi. Mereka yang selama ini tidak

pernah terjat hukum menjadi tidak kebal lagi terhadap hukum, sehingga banyak yang tersandung oleh hukum kolonial Belanda. Faktor-faktor tersebut di atas menjadi pemantik motivasi keterlibatan elit politik tradisional dalam peristiwa Bintunan (1873). Sementara itu, elit agama yang tidak terkena dampak langsung, termotivasi setelah bergabung dengan para elit politik tradisional.

B. Eskalasi Gerakan Sosial

Eskalasi gerakan sosial pada umumnya cenderung mengalami peningkatan seiring dengan munculnya peristiwa-peristiwa lain yang melengkapinya sehingga semakin memicu kebencian sosial terhadap pemerintah kolonial. Eskalasi gerakan sosial dalam peristiwa Bukit Palik (1807) dipengaruhi oleh beberapa hal yang memicu kebencian terhadap pemerintah kolonial Inggris. Pertama krisis keuangan pemerintah kolonial Inggris menyebabkan pembayaran kontrak dagang dengan para petani mengalami kemacetan sehingga menimbulkan keresahan di kalangan penduduk setempat. Kedua, kebijakan pemerintah kolonial Inggris menghapuskan gelar-gelar kehormatan tradisional yang dipakai oleh para elit politik setempat yang disertai dengan penghapusan pajak-pajak tradisional yang berakibat hilangnya hak-hak tradisional atas sungai, hutan, dan hasil bumi lainnya. Eskalasi gerakan sosial semakin meningkat dengan bergabungnya kelompok elit keturunan Bugis yang dimotori oleh Daeng Mabela. Daeng Mabela adalah orang yang sangat berpengaruh di kalangan para elit baik elit Suku Rejang (wilayah Sungai Lemau), elit

Suku Lembak (wilayah Sungai Itam), elit Suku Serawai (wilayah Selebar), elit keturunan Madura, serta elit keturunan Bugis itu sendirikarena jabatannya sebagai *hoofd van vreemdelingen* (kepala Penghulu Orang Asing), *Head of the Military Corps of Bugis* (kepala Korps Militer Bugis), serta anggota dalam *pangerangsraad* (dewan pangeran).⁵ Bergabungnya Daeng Mabela dalam peristiwa Bukit Palik semakin memperluas eskalasi gerakan sosial. Kebijakan pemerintah kolonial Inggris dalam hal pemaksaan tanam kopi juga meningkatkan eskalasi gerakan sosial karena semakin menambah kebencian masyarakat pribumi terhadap pemerintah kolonial Inggris, terutamanya daerah yang terkena sistem paksa tanam kopi termasuk wilayah Marga Peroatin Dua Blas yang meliputi Dusun Penanjung, Dusun Bukit, Dusun Talang, Dusun Besar, Dusun Pagar Duwa, Dusun Sukarami, dan Dusun Lagan.

Eskalasi gerakan sosial juga terjadi pada peristiwa Tabat Mono (1835). Peristiwa Tabat Mono (1835) yang semula hanya terbatas pada wilayah Dusun Tabat Mono saja, tetapi kemudian meluas hingga ke beberapa dusun yang ada di wilayah pegunungan. Eskalasi gerakan sosialnya meliputi Dusun Cinta Mandi, Dusun Tanjung Erang, Dusun Tabat Mono, Dusun Kaban Agung, Dusun Kelobak, Dusun Pagar Agung, Dusun Lumbun Ijuk, Dusun Tartik, Dusun Temedak, Dusun Temedak, hingga ke wilayah Lubuk Puding. Eskalasi gerakan sosial dalam peristiwa Seluma (1835) mengalami peningkatan. Peristiwa tersebut semula hanya terjadi di wilayah pasar Seluma, kemudian berkembang hingga sampai ke wilayah Angalam, Alas,

Pino, Manna, Padang Guci, dan Kedurang.

Eskalasi gerakan sosial pada peristiwa Tanjung Terdana (1873) dipicu oleh tiga hal, yaitu pemberlakuan *hoofd van belastingen* (pajak kepala), penerapan secara paksa Undang Undang Simbur Cahaya, serta penghapusan sistem *regententbestuur* (pemerintahan bupati) yang berdampak pada tata kehidupan tradisional para elit di tingkat kampung. Eskalasi gerakan sosial dalam peristiwa Tanjung Terdana semakin meningkat karena rakyat masih harus terbebani oleh pemaksaan tanam kopi. Peristiwa Tanjung Terdana yang semula hanya sebatas wilayah Dusun Tanjung Terdana, kemudian meluas hingga wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Dusun Tanjung Terdana, seperti Dusun Bentiring, Dusun Batu Radja, hingga wilayah Marga Salapan yang sebagian besar berasal dari Suku Lembak keturunan elit Sungai Itam. Eskalasi gerakan sosial Peristiwa Bintunan (1873) yang dimotori oleh Pasirah Mardjati alias Ratu Samban semula hanya terbatas pada wilayah Bintunan saja. Akan tetapi eskalasinya kemudian meningkat dan meluas hingga meliputi beberapa dusun. Beberapa dusun yang telah bergabung dalam peristiwa Bintunan yaitu : 1. Dusun Gedung Nyawo, 2. Dusun Durian Ampar, 3. Dusun Air Padang, 4. Dusun Batik Nau, 5. Dusun Pagar Ruyung, 6. Dusun Taba Kelintang, 7. Dusun Ulak Tanding, 8. Dusun Sekiau, 9. Dusun Seberang Tunggal, 10. Ketahun, 11. bahkan meluas hingga wilayah Kerinci.

C. Pola Pergerakan Massa

Pergerakan Massa merupakan salah satu bagian dari proses dalam gerakan

sosial. Pada umumnya pola pergerakannya ditentukan menurut garis komando dari para pemimpinnya. Namun tak jarang pula ditentukan melalui kesepakatan bersama di antara para pemimpin mereka, terutama jika terjadinya penggabungan dari beberapa kelompok massa. Pola pergerakannya biasanya hanya sampai pada target sasaran (orang), target waktu, dan lokasi (tempat).

Pola pergerakan massa dalam peristiwa Bukit Palik (1807) dimulai dari tahapan pengerahan massa. Dalam catatan sejarah, diketahui bahwa Daeng Mabela bekerja sama dengan Depati Sukarami telah melakukan pengerahan massa. Atas bantuan dari Depati Dusun Besar, Depati Lagan, Depati Pagar Dewa, serta Si Banjar dan Si Anjut (adik Depati Sukarami), massa dapat dikumpulkan sebanyak 300 orang. Tahap selanjutnya adalah menentukan target sasaran (orang), target lokasi (tempat), dan jadwal pergerakannya. Target sasarannya adalah Residen Thoms Parr yang dianggap sebagai biang keladinya. Target lokasi yang dipilihnya adalah Bukit Palik (Mount Felix), sebuah tempat peristirahatan Residen Thomas Parr. Target waktu ditentukan pada tanggal 23 Desember 1807, tengah malam. Pada waktu yang telah ditentukan, massa sekitar 300 orang bergerak menuju Bukit Palik, tempat peristirahatan Thomas Parr. Massa kemudian memasuki rumah dan menuju kamar tidur Thomas Parr, lalu mengeksekusinya. Pola pergerakan massa berakhir setelah target sasaran terpenuhi. Massa kemudian membubarkan diri kembali ke tempatnya masing-masing.

Demikian juga dengan pola pergerakan massa dalam peristiwa Tabat Mono (1835) yang meskipun sedikit berbeda dengan pola pergerakan massa pada peristiwa Bukit Palik (1807). Peristiwa Tabat Mono merupakan peristiwa penghadangan massa terhadap pasukan kompeni Belanda yang datang ke wilayah pegunungan. Pola pergerakannya juga ditentukan oleh para pemimpinnya. Tahap pertama dimulai dengan pemberitahuan untuk tidak bekerja sama dengan pihak pasukan kompeni Belanda. Pada tahap ini, Depati Tjinta Mandi memberitahukan kepada Depati Tanjong Erang melalui Depati Sukarami, dan Raja Mantiko agar tidak bekerja sama dengan kompeni belanda. Surat Depati Tjinta Mandi tersebut tertanggal 28 Juni 1835. Untuk lebih jelasnya berikut bunyi isi surat Depati Tjinta Mandi kepada Depati Tanjong Erang.⁶

Tahap berikutnya adalah penghadangan, lalu penyerpahan. Peristiwa penghadangan hingga penyerpahan pasukan kompeni Belanda oleh massa telah dilaporkan oleh saksi sejarah, yaitu Si Lamoen, dan Si Mandai (Opas), serta Si Tobi dan Si Lanjar (kuli). Menurut keterangan para saksi sejarah tersebut di atas, disebutkan bahwa massa menghadang dan menyerang di atas bukit masuk wilayah Tabat Mono. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 26 Juni 1835. Demikian pula dengan pola pergerakan massa dalam peristiwa Tanjung Terdana (1873) yang tidak jauh berbeda dengan pola pergerakan massa pada peristiwa gerakan sosial sebelumnya. Target Sasarannya sudah ditentukan, yaitu Asisten Residen Belanda H.C.Humme, yang dianggap sebagai biang penyebab

kesengsaraan rakyat karena telah menerapkan peraturan *hoofd van belastingen* (pajak kepala), serta wajib paksa tanam kopi yang sangat memberatkan rakyat. Sementara itu waktu yang ditentukan adalah tanggal 3 April 1873. Target lokasinya, yaitu pusat pemerintahan Belanda di Fort Marlborough (Benteng Marborough). Namun peristiwa penyerbuan Fort Marlborough ini mengalami kegagalan. Target sasarannya, yaitu Asisten Residen H.C. Humme berhasil meloloskan diri dari pergerakan massa yang dipimpin oleh Burniat dan haji Merdayan.

Sementara itu, pola pergerakan massa dalam peristiwa Bintunan (1873) dimulai dari tahapan pertemuan rahasia dengan para kepala pribumi (pasirah, pemangku, datuk, serta depati) di Kerkapyang diprakarsai oleh Pasirah Mardjati.⁷ Dalam pertemuan tersebut sepakati bersama untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, dengan target sasaran utamanya adalah Asisten Residen H. van Amstel dan Kontroleur van Castens Target lokasi juga sudah disepakati bersama, yaitu di Sungai Bintunan. Sementara itu, target waktunya menunggu informasi mengenai jadwal perjalanan dinas Asisten Residen H. van Amstel.

Selanjutnya dilakukan pembagian tugas lapangan. Sebagian mendapat tugas untuk mengawasi gerak-gerik pasukan kompeni pengawal serta mengintai keberadaan Asisten Residen H. van Amstel di ibukota Bengkulu. Sebagian lagi mengawasi jalur-jalur lalu lintas penyeberangan mulai dari Sungai Bangkahoeloe, Sungai Itam, Air Palik, Air Besi, Sungai Lais, hingga Sungai Bintunan.

Setelah mendapatkan informasi mengenai jadwal perjalanan dinas Asisten Residen H. van Amstel, Pasirah Mardjati dan Pembarap Maradunsegera mempersiapkan massa untuk melakukan gerakan sosial. Dalam catatan sejarah diketahui bahwa, pada tanggal 1 September 1873, Asisten Residen H. van Amstel dengan pengawalnya berangkat dari kota Bengkulu menuju Lais melalui jalur sungai. Sesampainya di Lais, rombongan Asisten Residen H. van Amstel menginap di rumah dinas Kontroleur Castens. Oleh karena target lokasi penyerangan sudah ditentukan dan disepakati bersama, maka pergerakan massa tetap dikonsentrasikan di Sungai Bintunan. Strategi pergerakan yang dilakukan oleh Pasirah Mardjati dan kawan-kawannya adalah berpura-pura kompromis, dan tidak menunjukkan sifat permusuhan dengan kompeni Belanda. Oleh karena itu, Pasirah Mardjati dan kawan-kawannya mengerahkan massa untuk melakukan penyambutan secara adat rombongan Asisten Residen H. van Amstel dan Kontroleur Castens. Akan tetapi ketika Asisten Residen H. van Amstel dan Kontroleur Castens telah berada diatas rakit penyebarangan, Pasirah Mardjati dan Ketip Payung dalam waktu yang hamper bersamaan menghunus kerisnya lalu menghujamkan ke tubuh Asisten Residen H. van Amstel dan Kontroleur Castens hingga keduanya roboh dan tewas. Demikian pola pergerakan massa dalam peristiwa gerakan sosial yang hampir tidak ada perbedaan yang menonjol. Intinya pola pergerakannya berjalan dalam waktu yang relatif singkat, dan hanya sampai pada pencapaian target sasaran.

D. Kelompok Elit yang Terlibat

Peristiwa gerakan sosial yang terjadi di Bengkulu abad XIX baik pada era kolonial Inggris maupun era kokonial Belanda tidak terlepas dari keterlibatan kaum elitnya. Kaum elit ini bahkan cenderung terlibat secara langsung dalam peristiwa gerakan sosial.

Kelompok elit yang terlibat dalam peristiwa Bukit Palik (1807), yaitu kelompok elit keturunan Sungai Itam dan kelompok elit keturunan Bugis. Kelompok elit keturunan Sungai Itam dipelopori oleh para kepala kampung yang berasal dari Suku Lembak, yaitu Depati Sukarami, Depati Dusun Besar, Depati Lagan, dan Depati Pagar Duwa. Keterlibatan mereka dalam peristiwa Bukit Palik (1807) tersebut tidak lepas dari faktor pemicunya, yaitu faktor ekonomi, dan politik. Kebijakan pemerintah kolonial Inggris yang memaksakan kembali sistem tanam kopi kepada penduduk pribumi Bengkulu. Sementara tanaman kopi sudah lama ditinggalkan dan penduduk sudah beralih pada tanaman merica yang hasilnya lebih menguntungkan. Keterlibatan kelompok elit keturunan Sungai Itam ini juga dipicu oleh intervensi politik kolonial Inggris yang berlebihan terhadap tata kehidupan tradisional masyarakat setempat. Keterlibatan kelompok elit keturunan Bugis dipelopori oleh Daeng Mabela, diduga ada keterkaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Peristiwa sebelumnya, yaitu diberhentikannya Daeng Mabeladari jabatannya sebagai *Hoofd van Vreemdelingen* (Penghulu Orang Asing) oleh Residen Thomas Parr. Peristiwa hukuman cambuk terhadap

anak laki-laki Daeng Mabela oleh Thomas Parr juga memperkuat alasan keterlibatannya dalam peristiwa Bukit Palik.

Sementara itu, kelompok elit yang terlibat dalam peristiwa Tabat Mono (1835) sebagian besar dilakukan oleh kelompok elit dari Suku Rejang Pegunungan antara lain: Depati Cinta Mandi, Depati Sukarami dari Dusun Tabat Mono, Depati Tanjung Erang, Depati Kelopak, Depati Kaban Agung, Depati Pagar Agung, Depati Lumbun Ijuk, Depati Tartik, Depati Temedak, dan juga Pangeran Lubuk Puding, serta Peroatin Satu Sabha Bukit.⁸ Peristiwa Tabat Mono juga melibatkan kelompok elit dari Dusun Kandang, yaitu: Silek gelar Rajo Alam ulama Sidi, dan si Janggut, serta Ginde Sebetok (dari Dusun Kota Agung), dan Ginde Ubei (dari Dusun Temedak).⁹ Keterlibatan kelompok elit ini juga tidak lepas dari latar belakang kepentingan ekonomi, dan juga politik. Faktor ekonomi berkaitan dengan pelaksanaan sistem *cultuur stelsel* (sistem tanam paksa) yang mulai diuji cobakan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa Asisten Residen John Hendrik Knoerle (1833). Intervensi politik kolonial Belanda terhadap hak-hak tradisional, seperti *pre-emptsi* (hak mengklaim) atas sungai, hasil hutan, serta gelar-gelar kehormatan telah memicu keterlibatan mereka dalam peristiwa Tabat Mono (1835).

Kelompok elit yang terlibat dalam peristiwa Tanjung Terdana (1873) banyak didominasi oleh kelompok elit keturunan Sungai Itam yang berasal dari Suku Lembak. Kelompok elit ini dipelopori oleh Pangeran Burniat (elit politik tradisional dari Tanjung Terdana) dan Haji Merdayan

(elit agama dari Tanjung Terdana). Peristiwa Tanjung Terdana ini juga melibatkan kelompok elit dari Marga Salapan yang sebagian besar dari Suku Lembak, antara lain : 1. Depati Pagardin, 2. Depati Bentiring, 3. Depati Jurdanah, 4. Depati Durian Rampak, 5. Depati Plaju, 6. Depati Kembang Sri, 7. Depati Paku Haji, 8. Depati Dusun Baru, 9. Depati Kudrus, 10. Depati Taba Pasmah, 11. Si Benyole, 12. Depati Nibung Laut, 13. Depati Pangah, 14. Depati Batu Raja, 15. Depati Batu Mimbang, 16. Depati Baruge, dan 17. Depati Tanah Abang.¹⁰ Keterlibatan mereka dalam peristiwa Tanjung Terdana dipicu oleh tiga hal, yaitu pemberlakuan *hoofd van belastingen* (pajak kepala), penghapusan sistem *regentbestuur* (pemerintahan bupati), serta pemberlakuan secara paksa Undang Undang Simbur Cahaya. Di samping itu, penduduk pribumi masih terbebani sistem tanam kopi.

Demikian juga dengan keterlibatan kelompok elit dalam peristiwa Bintunan (1873). Kelompok elit yang terlibat dalam peristiwa Bintunan (1873) tercatat sebagai berikut: 1. Pasirah Mardjati alias Ratu Samban (Pasirah Marga Bintunan); 2. Pembarap Hadji Meradoen (Marga Bintunan); 3. Ketib Pajoeng (Marga Bintunan); 4. Pembarap Gatin gelar Radja Malim; 5. Merisin gelar Radjo Depati (Marga Air Padang); 6. Datoek Doeralim (Marga Pasar Lais); 7. Datoek Ganik (Marga Pasar Lais); 8. Laih gelar Depati Ngraksa Wigoena (Marga Lais); 9. Merasan (Marga Lais); 10. Rien gelar Soeka Compani (Marga Air Besi); 11. Pama gelar Radja Itam (Marga Air Besi); 12. Pembarap Moesih (Marga Palik); 13. Abas gelar Depati Krama Djaja (Marga Palik);

14. Pasirah Roepa gelar Depati Karta Negara (Marga Kerkap); 15. Semer (Marga Kerkap); 16. Pasirah Njato gelar Radja Alam (Marga Perbo); 17. Pengidan (Marga Perbo); 18.; Datoek Selasa gelar Radja Moeda (Marga Pasar Ketahun); 19. Pasirah Naka gelar Radja Mangkoeto (Marga Ketahun).

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa keterlibatan kelompok elit dalam gerakan sosial pada abad XIX di Bengkulu berkaitan erat dengan faktor ekonomi, dan faktor politik yang keduanya berimbas pada mata pencaharian tradisional mereka.

Kesimpulan

Motivasi keterlibatan elit politik tradisional dan elit agama dalam gerakan sosial tidaklah tunggal, melainkan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi, maupun politik. Motivasi elit politik tradisional dan elit agama terlibat dalam gerakan sosial di Bengkulu pada abad XIX berkaitan erat dengan masalah ketidak-adilan, kesewenangan, ketertindasan, maupun kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah kolonial.

Motivasi elit politik tradisional dan elit agama terlibat dalam gerakan sosial ditentukan oleh status dan peran yang disandangnya dalam masyarakat. Semakin tinggi status sosialnya, semakin besar peran sosialnya, maka semakin kuat pula motivasi keterlibatannya dalam gerakan sosial. Oleh karena elit politik tradisional status sosialnya lebih tinggi, dan peran sosial lebih besar, maka motivasinya terlibat dalam gerakan sosial cenderung lebih kuat daripada elit agama. Bahkan kecenderungannya, elit agama termotivasi untuk terlibat dalam gerakan

sosial setelah bersekutu dan menjalin kerjasama dengan elit politik tradisional setempat.

Referensi

-
- ¹J. Kathirithamby-Wells, 1979:255).
²Arsip Nasional RI. No. B:1/17.
³P. Wink, 1926: 125-127.
⁴Arsip Nasional RI. B: 2/21.
⁵Arsip Nasional RI B:6/13.
⁶Lady Sophia Raffles, 1830: 303.
⁷P.Wink, 1929: 131.
⁸Brieven aan..., (Arsip Nasional RI. B: 7).
⁹*Ibid.*, hlm. 156.
¹⁰Statistiek Tableau van den Afdeeling Ommelanden en Seloema in de Adsistent Residentie Benkoelen (Arsip Nasional RI. B:2/3).
Arsip Nasional RI. B: 2/21. *Algemeene Administratief Verslag over het 1873*.
Arsip Nasional RI B:6/13. *Over Pangerangs Raad Bencoolen*.
Arsip Nasional RI. No. B:1/17). *Politiek Verslag van de Adsistent Residentie Benkoelen over het Jaar 1870-1872*.
Arsip Nasional RI. B: 7. *Brieven aan den Ass. Resident Benkoelen P. de Perez, 1835*.
William Marsden, *The History of Sumatra*. (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966
Garraghan, Gilbert J. 1957. *A Guide to Historical Method*. New York. Fordham University Press.
Harfield, Alan. *Bencoolen, A History of the Honourable East India Company's Garrison on the West Coast of Sumatra (1685-1825)*. Hampshire , First Published by A.& J. Partnership, 1995.
Kathirithamby-Wells, J. A. *Survey of the Effects of British Influence on Indigenous Authority in Southwest Sumatra (1685-1824)*. BKI, dee. 129, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1973.
Lady Sophia Raffles. (1830). *Memoir of the Life and Public Services of Sir Thomas Stamford Raffles*, FRS, & C . London.
P. Wink. (1912). *De Ontwikkeling de Inheemsche Rechtspraak in het Gewest Benkoelen*. TBG, deel.LXIX.. Batavia: Albrecht & Co.
_____. (1926). *De Onderafdeeling Lais in de Residentie Bengkoeloe*. VBG. Deel.

LXVI. 's Gravenhage: Martinus-Nijhoff. Sumatera Factory Record, 103. (1802). *Fort Marlborough porceedings, Enguiries into the Claims of the Kaur Chiefs by order of Walter Ewer, Commissioner, Taken by John Campbell, Resident of the Southerm Districts.*